

# Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan Penegakan Hukum di Indonesia

Anisaul Nurul Hidayati<sup>1</sup>, Esha Riska Qur'ani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup> Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author's email: [anisaulnh@student.uns.ac.id](mailto:anisaulnh@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan kewarganegaraan dalam penegakan hukum dengan menggunakan metode penelitian yaitu studi literatur dengan mengacu pada sumber-sumber yang relevan seperti buku dan artikel-artikel jurnal.

**Kata kunci:** Hak, Kewajiban, Peran Pendidikan Kewarganegaraan

---

## I. Pendahuluan

Penegakan hukum yang efektif dan adil merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan negara hukum di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan hukum dan mengembangkan budaya hukum yang kuat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara diberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta nilai-nilai demokrasi yang mendasari sistem hukum Indonesia.

## II. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penegakan Hukum

---

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak positif yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun dalam praktek pembelajaran seringkali Pendidikan Kewarganegaraan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa lebih ditekankan pada aspek sikap dan keterampilan, pendidikan sangat penting untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari terlebih moral. Berikut adalah beberapa peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam penegakan hukum:

### 1. Pemahaman tentang Hukum

Pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konstitusi, sistem peradilan, hak asasi manusia, dan norma-norma hukum lainnya. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat dapat menghindari pelanggaran hukum dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pendidikan kewarganegaraan membantu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan di Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, sistem peradilan, dan aturan hukum lainnya. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan menghormati proses hukum yang berlaku.

Peningkatan kesadaran mengenai peran dan tanggungjawab warga negara pada generasi muda dalam bidang hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan generasi muda memiliki arah dalam penentuan sikap sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun konsep penegakan hukum memberikan pengetahuan tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan nilai yang baik pada generasi muda dapat menjadikan mereka sebagai generasi yang baik (Halimah et al., 2021). Konsep penegakan hukum memberikan pengetahuan tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan hukum bagi generasi adalah penting (Ulfah et al., 2021). Dengan memberikan Konsep penegakan hukum, generasi muda akan terhindar dari kemerosotan perilaku negatif.

## 2. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

Partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pendidikan kewarganegaraan dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses hukum, seperti melaporkan tindakan kejahatan, menjadi saksi, atau berperan sebagai anggota juri. Dengan memahami peran mereka dalam sistem hukum, masyarakat dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Siswa

diajarkan mengenai hak-hak dasar yang dimiliki sebagai warga negara serta kewajiban mereka dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban, masyarakat akan lebih mampu berpartisipasi secara aktif dalam penegakan hukum.

### **3. Pembentukan Etika dan Moral**

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk etika dan moral yang baik pada individu. Melalui nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, siswa dapat menginternalisasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan lebih cenderung untuk hidup sesuai dengan aturan hukum dan mempromosikan keadilan dalam masyarakat.

### **4. Partisipasi dalam Proses Hukum**

Pendidikan kewarganegaraan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses hukum. Melalui simulasi pengadilan, perdebatan hukum, atau kunjungan ke lembaga peradilan, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana sistem peradilan beroperasi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum dan membantu mereka memahami pentingnya memperjuangkan keadilan.

### III. Faktor penghambat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan

Terkait dengan wacana pendidikan moral dalam sistem pendidikan formal (persekolahan), kiranya relevan untuk diungkapkan kembali “paradigma lama” tentang pendidikan, yakni pendidikan sebagai pewarisan dan pelestarian nilai-nilai. Paradigma semacam itu dikemukakan Bourdieu dalam Karabel and Halsey (1977:488). Pewarisan dan pelestarian nilai-nilai budaya warisan masa lalu tersebut terutama menyangkut nilai-nilai moral dan adat istiadat. Pada masa yang silam, pendidikan moral pada mulanya dipandang sebagai inti dan wajah pendidikan itu sendiri. Paradigma pendidikan seperti ini sering dianggap kuno, konservatif, dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Paradigma pendidikan modern adalah pendidikan untuk perubahan, bukan untuk pemeliharaan nilai-nilai atau penjaga tradisi. Pendidikan yang fungsional adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Pandangan ini tak mungkin ditolak, namun tidak berarti bahwa nilai-nilai warisan masa lalu, seperti adat istiadat dan moral, merupakan sesuatu yang sudah usang dan harus dibuang.

Pendidikan kewarganegaraan juga dapat berperan dalam peningkatan kualitas sistem hukum di Indonesia. Dengan menyediakan pendidikan yang efektif tentang hukum dan keadilan, pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan generasi muda yang berintegritas, menghormati hukum. Pihak sekolah memang berupaya

untuk membentuk kepribadian peserta didik, termasuk di dalamnya adalah untuk membentuk peserta didik yang patuh pada aturan, namun pada kenyataannya usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik kepala, guru dan karyawan masih jauh dari harapan. seperti belum adanya kekompakan personil sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik, serta masih minimnya keteladanan yang diberikan guru kepada peserta didik.

Pembelajaran hukum yang diberikan dalam PKn selama ini hanya berupa pengetahuan saja, peserta didik tidak mengetahui hukum- hukum yang nyata yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian tidak semua guru peduli terhadap tata tertib, sehingga kebanyakan peserta didik hanya patuh pada tata tertib karena takut berurusan dengan guru-guru yang ditakutinya, artinya kurang ada kekompakan pihak sekolah dalam menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik. Kemudian dari analisis mengenai faktor-faktor penghambat upaya penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dalam keluarga yang menghambat internalisasi hukum dalam diri peserta didik adalah peserta didik yang ketika memasuki jenjang pendidikan menengah dititipkan di pesantren atau kost, sehingga perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak secara umum sangat minim, keluarga hanya memperhatikan kebutuhan ekonomi peserta didik saja, sedangkan perhatian terhadap akhlak, sikap dan perilaku anak kurang, sehingga pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang notabene hanya terbatas di lingkungan sekolah. Ketika mereka di masyarakat cenderung tidak ada yang mengawasi.

#### IV. Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, kesadaran akan hak dan kewajiban, pembentukan etika dan moral yang baik, serta partisipasi aktif dalam proses hukum. Namun, terdapat juga faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kekompakan personil sekolah, minimnya keteladanan dari guru, dan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menjalankan pendidikan kewarganegaraan secara efektif.

Membentuk karakter dalam pendidikan hukum warga negara, adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum progresif, hukum responsif dalam sistem hukum Pancasila. Pembentukan karakter diarahkan antara lain pada terbentuknya karakter religius, cerdas, jujur, tangguh, demokratis, peduli, berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mandiri dan percaya diri. Karakter dilaksanakan, bukan sebatas wacana/pengetahuan dalam aktivitas pembelajaran. Juga tak kalah penting adalah dengan keteladanan. Dengan kata lain pembentukan karakter membutuhkan nilai karakter yang jelas, ada sistem dan model.

## V. Referensi

Cholisin. “MEMBENTUK KARAKTER DALAM PENDIDIKAN HUKUM WARGA NEGARA”.

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/penelitian/MEMBENTUK+KARAKTER+DALAM+PENDIDIKAN+HUKUM+WARGA+NEGARA.pdf>, diakses 20 Mei 2023

Giwangsa.S.F. “PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”.

<http://www.jurnal.iailm.ac.id/index.php/madrosatuna/article/view/16>, diakses 20 Mei 2023

Isep. “PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGUPAYAKAN INTERNALISASI HUKUM DI KALANGAN PESERTA DIDIK”. <https://media.neliti.com/media/publications/123888-ID-peranan-pendidikan-kewarganegaraan-sebag.pdf>, diakses 20 Mei 2023

Rosidah.U. “PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENIGKATAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI”. <http://immjpmipa.fkip.uad.ac.id/2021/10/29/peran-pendidikan-kewarganegaraan->



[dalam-peningkatan-pembentukan-karakter-bangsa-di-tengah-arus-globalisasi/](#),

diakses 20 Mei 2023

Subagio.T.R. “PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KONSEP PENEGAKAN HUKUM PADA GENERASI MUDA”.

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1718>, diakses 20 Mei 2023

Suradi.L. “PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN WARGANEGARA YANG CERDAS DAN BAIK(SMART DAN GOOD CITIZEN)”.

<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/13143/7622> ,diakses 20 Mei 2023